



Gerakan Feminisme Fujinkai dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia

Dimas Aditia^{1*}, Erika Sukma Lestari², Dea Nuci Adelia³, Suparman Arif⁴, Yusuf Perdana⁵

¹ Universitas Lampung; aditiad872@gmail.com

² Universitas Lampung; erikalestari592@gmail.com

³ Universitas Lampung; deanuciadelia@gmail.com

⁴ Universitas Lampung; suparmanarif81@yahoo.com

⁵ Universitas Lampung; yusuf.perdana@fkip.unila.ac.id

* Korespondensi

Dikirim: 03-02-2022; Diterima: 27-04-2022; Diterbitkan: 25-06-2022

Abstract: The Dutch defeat of its rule in the colonies ended the practice of colonialism and western-style imperialism. However, that does not necessarily make Indonesia immediately free and independent just like that. During the Japanese rule, various forms of propaganda were introduced, one of which was Fujinkai which was made at the beginning of the Japanese occupation of Indonesia. Fujinkai became a women's organization, significantly overshadowing all women's activities at that time. This study aims to study the Fujinkai Feminism Movement from the Perspective of the History of Women's Struggle in Indonesia. At the same time, there is also a line of supporters who participate in the Japanese tantara. The method used in this study is a historical method consisting of 5 stages: determination of topics, source collection (heuristic), source criticism, interpretation, and writing (historiography). The result of this research includes looking at Fujinkai's role in the history of Indonesian women's struggle in the field of Education and social activities, establishing relationships with Japan in the fields of arts and virtues, and sharpening science and skills training.

Keywords: Fujinkai; feminism movement; women's struggle

Abstrak: Kekalahan Belanda atas kekuasaannya di daerah jajahan mengakhiri praktik kolonialisme dan imperialisme ala barat. Namun, hal itu tidak serta merta membuat Indonesia langsung merdeka dan merdeka begitu saja. Pada masa pemerintahan Jepang, berbagai bentuk propaganda diperkenalkan, salah satunya adalah Fujinkai yang dibuat pada awal pendudukan Jepang di Indonesia. Fujinkai menjadi organisasi wanita, yang secara signifikan menaungi semua aktivitas wanita saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gerakan feminisme Fujinkai dari perspektif sejarah perjuangan perempuan di Indonesia. Pada saat yang sama, ada juga barisan pendukung yang ikut serta dalam tantara Jepang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari 5 tahap: penentuan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Hasil penelitian ini antara lain melihat peran Fujinkai dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia di bidang pendidikan dan kegiatan sosial, menjalin hubungan dengan Jepang dalam bidang seni dan kebajikan, serta mengasah ilmu pengetahuan dan pelatihan keterampilan.

Kata Kunci: Fujinkai; gerakan perempuan; perjuangan perempuan



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kekalahan Belanda atas kekuasaannya di tanah jajahan mengakhiri praktik kolonialisme dan imperialisme gaya Barat. Namun itu semua tidak lantas membuat Indonesia langsung terbebas dan merdeka begitu saja. Masuknya Jepang pada periode (1942-1945) merupakan babakwaktu yang amat menentukan dalam perjalanan historis Indonesia. Pada hampir setiap daerah di Nusantara, Jepang melancarkan propaganda atau politisasi bangsa hingga tingkat desa dengan sengaja dan pemberlakuan rezim kolonial yang menindas, merusak serta menyengsarakan rakyat. Sewaktu Jepang kembali ke negaranya, sebetulnya sangat banyak perubahan signifikan yang mendorong adanya peristiwa revolusi nasional (Ricklefs, 2011).

Sejak permulaan abad ke-19, sebetulnya sudah banyak wanita Indonesia yang berlaga dikalahkan sejarah secara independen (personal) dalam upaya membela tanah air tercinta, misalnya Cut Nyak Dien, R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Jika ditelisik lebih jauh sebetulnya bukan saja kaum 'adam' saja melainkan ada kaum 'hawa' yang turut andil dan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari pendudukan Jepang. Sehingga kepenulisan ini akan mengkaji terkait keberadaan perempuan di Indonesia pada masa *Dai Nippon*, serta peranannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan legitimasi perempuan melalui kacamata kesetaraan gender (Mukmin, 1980, p. 78).

Kedatangan bangsa Jepang dengan membawa banyak kebijakan amat dirasakan dengan melihat perubahan signifikan oleh pemerintah *Dai Nippon* terhadap masyarakat Indonesia kala itu. Mengutip dari Soediro (1945, p. 25) di masa pendudukan Jepang, perempuan dikerahkan dalam sektor perang. Mobilisasi wanita dalam Fujinkai ini ditempuh dengan dua cara. Pertama, pelatihan keprajuritan, yakni mencakup latihan baris berbaris, P3K, sampai teknik persenjataan. Kedua, pelatihan memasak dan nantinya mereka akan ditugaskan dibagian dapur umum.

Di samping itu, pemerintahan *Dai Nippon* membentuk Fujinkai (Organisasi Wanita) yang tugas pokok dan fungsinya mewadahi berbagai bentuk kegiatan yang bersifat kewanitaan. Fujinkai tersebar mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, seperti *ken* untuk tingkat kabupaten dan *si* untuk setingkat kota. Sementara istri dari *kenko* (bupati) berkedudukan sebagai mayor dari perkumpulan ini. Oleh karena itu Fujinkai mengemban kewajiban sebagai ibu-ibu atau para pamong praja. Anggota-anggota dibawah mereka wajib mengomandoi tenaga kaum wanita di tempat yang telah tersedia, sedangkan yang direkrut menjadi anggota adalah para gadis yang berumur 15 tahun ke atas. Keanggotaan Fujinkai juga terbuka orang luar (siapapun) (Panita Kongres Wanita Indonesia, 1986, p. 85).

Adapun barisan lain yang juga turut dipersiapkan di belakang garis perang, mereka diberikan latihan kepalangmerahan, baris-berbaris, mengotak-atik senjata, latihan udara, visitasi rumah sakit, pengadaan dapur umum, dapur keliling, dapur tetap dan dapur pembelaan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Fujinkai di antaranya membakar semangat nasionalisme dikalangan wanita, sebagai pasukan cadangan untuk berpartisipasi dibelakang lini pertempuran., pengajaran hidup disiplin dan berhemat, optimalisasi produksi bumi dengan menanam semua lahan dengan varian komoditas pangan dan tekstil, antara lain ubi, jarak,

kapas dan lain-lain, membangkitkan kerajinan tangan dan produksi rumahan antara lain usaha memintal benang dan membuat kaus kaki, melaksanakan latihan gabungan sesuai kebutuhan., membuka lapangan pekerjaan untuk memangkas tingkat pengangguran (Lasmidjah, 1982, p. 30).

Isu gender memang selalu dapat menarik perhatian banyak orang. Tidak jauh berbeda dengan perempuan di masa kuno, gambaran peran perempuan pada awal masa modern masih terkesan kaku dan sempit. Kehidupan perempuan selalu diliputi tradisi-tradisi yang masih sangat terbelakang seperti halnya mengurus dan mengatur rumah, serta mendidik dan mengasuh anak-anak. Hak-hak hidupnya sangat dibatasi, bahkan perempuan sering diibaratkan sebagai orang yang hanya mengetahui kehidupan dapur, sumur, dan kasur. Perbedaan masa modern kolonial dengan masa kuno terletak pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga pendidikan menjadi peranan penting dalam kehidupan.

Penulisan ini adalah temuan yang mengandung unsur kebaruan karena di dalamnya terdapat perbedaan dan keunikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya pada penelitian milik Kosasih (2019) yang membahas tentang perjuangan politik perempuan di masa pendudukan Jepang dan penelitian Amar (2017) yang membahas tentang perjuangan gender dalam kajian sejarah wanita Indonesia pada abad ke-19. Kedua penelitian itu yang menjadi acuan bagi peneliti untuk mengambil perspektif berbeda yang dikaitkan dengan gerakan feminisme dan perjuangan perempuan Indonesia. Dalam kaitannya dengan sejarah Fujinkai, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana organisasi wanita (Fujinkai) jika dilihat melalui kaca mata kesetaraan gender di abad ke-21 (modern) ini, bahwa ternyata perempuan sejak masa penjajahan *Dai Nippon* pun sudah diberi ruang untuk berkontribusi. Selain itu, peneliti ingin mencari tahu beda peran perempuan sejak masa pendudukan Jepang yang dominan angkat senjata atau berada di medan tempur, namun di era modern seperti sekarang ini perempuan diberi tempat yang sejajar dengan pria di berbagai sektor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gerakan feminisme Fujinkai dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia. Kepenulisan ini menjadi penting dan *urgent* karena dewasa ini, stigma-stigma mengenai gender kembali naik ke permukaan, bagaimana seseorang melihat sebuah gender tertentu sebagai sesuatu yang lemah dan tak pantas untuk mendapati pekerjaan atau kedudukan tertentu. Dalam penulisan ini, penulis mengambil organisasi wanita (Fujinkai) bentukan Jepang yang identik dengan tenaga pembantu Jepang ‘dibalik layar’ berkembang menjadi wanita independen dan mampu sejajar kedudukan dan posisinya dengan kaum pria.

Metode Penelitian

Kata metode merupakan bagian dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya langkah-langkah. Sedangkan dalam kaidah ilmiah, kata metode berkaitan dengan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui objek yang hendak menjadi tujuan penelitian (Hamid, 2011). Menurut Gottschalk (1986) Ilmu sejarah mempunyai metode tersendiri yang membutuhkan analisis dan pengamatan di setiap penyusunan hasil penelitian

kedalam bentuk tulisan. Metode sejarah pun diharapkan mampu merekonstruksi sebanyak mungkin peristiwa yang ada pada masa lampau. Sejalan dengan pernyataan Kuntowijoyo (2003) yang memaparkan metode sejarah sebagai sebuah pedoman tata laksana berupa pengkajian bahan, kritik sumber, interpretasi serta penyajian sejarah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian Historis. Metode historis atau sejarah yaitu suatu cara yang digunakan seorang peneliti untuk mencari kebenaran penelitian (Wasino, 2018). Untuk melaksanakan penelitian Historis, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut (Kuntowijoyo, 1995): Heuristik ialah mencari bukti-bukti atau bahan-bahan sumber yang diperlukan (Wasino, 2018) Sumber yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dokumen, arsip yang sesuai dengan tema Fujinkai. Peneliti mengupayakan terkumpulnya data yang lengkap dalam jumlah yang banyak agar mempermudah dalam tahapan selanjutnya. Peneliti dalam hal ini juga mencari sumber literatur melalui media elektronik seperti contohnya *Google-Scholar*, *e-book*, *digital library* Universitas dalam negeri yang berkaitan dengan tema Fujinkai dalam kacamata kesetaraan gender.

Kritik adalah menilai atau menguji bahan-bahan sumber untuk menentukan/menetapkan otentisitas atau kebenaran (Wasino & Hartatik, 2018). Pada tahap kritik dilakukan penyeleksian dengan rujukan prosedur yang ada yaitu orisinil dan terjamin kebenarannya terhadap sumber yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Kritik ini digunakan untuk mengukur keautentikan data dan informasi yang didapatkan. Jika berupa sumber lisan maka peneliti melakukan telaah dan analisis terhadap hasil perolehan data yang ditemukan dengan melihat latar belakang informan serta kaitan informan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti menjamin keakuratan dan relevansi berdasarkan data hasil kesaksian narasumber atau informan dengan kejadian yang terjadi pada kenyataan di lapangan. Kritik intern dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji kebenaran dari sumber yang telah terkumpul. Kritik intern merupakan kritik yang berhubungan dengan kebenaran data yang diperoleh dan dapat dipercayai sebagai fakta sejarah yang tepat atau tidak (Gottschalk, 1986). Kritik dilakukan terhadap keseluruhan sumber yang terkumpulkan, sehingga dapat diketahui data mana sajakah yang menunjang dalam penelitian atau tidak yang dapat membantu peneliti menyelesaikan permasalahan yang hendak dikaji mengenai Fujinkai dalam kacamata kesetaraan gender. Tugas peneliti adalah merekonstruksi fakta sejarah yang didapatkan secara kronologis, sehingga hal yang diperoleh dalam tahap interpretasi berupa kisah yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi (Zainal, Swatika, & Sugiyanto, 2020). Hal yang perlu diperhatikan disini adalah peneliti memerlukan kehati-hatian serta integritas yang tinggi agar menjauhi unsur subjektivitas dalam menginterpretasikan data yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh tetap memberikan gambaran ilmiah pada sumber yang telah melalui tahapan heuristik dan kritik di atas pada data-data yang berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai Fujinkai dalam kacamata kesetaraan gender.

Hasil Penelitian

Gerakan Feminisme Fujinkai Pada Masa Jepang

Saat Jepang menduduki dan menguasai Indonesia, perempuan tidak mendapatkan banyak kesempatan, karena setiap gerakan diawasi secara ketat oleh pemerintah Jepang. Untuk memenuhi harapan pemerintah Jepang, ketika gerakan Tiga A didirikan, pada saat itu dibentuk pula gerakan istri 3-A yang di pimpin oleh Atina Syamsuddin yang dilengkapi berbagai bagian perempuan yang dikenal Barisan Putri Asia Raya (PUTERA). Sejak dibentuknya PUTERA pada bulan Maret 1943, maka terbentuk pulalah garis kerja perempuan PUTERA, yang sebagian diantaranya adalah perempuan (Manus, 1985).



Gambar 1. Kelompok Fujinkai sedang berlatih dengan senjata
Sumber: Postkata.com, 2018

Selain gerakan tersebut, pemerintah Jepang juga telah membentuk organisasi perempuan atau biasa disebut juga Fujinkai yang status khususnya menampung berbagai bentuk kegiatan perempuan. Fujinkai pada saat itu didirikan dari tingkat pusat hingga tingkat yang lebih rendah, dan diberi nama sesuai tingkatan dan tempat tinggalnya, seperti "*ken*" untuk kabupaten dan "*si*" berlaku bagi kota. Perkumpulan ini juga diketuai oleh seorang istri dari *Kenko* (Bupati). Oleh karena itu, Fujinkai wajib dimiliki oleh para wanita atau pegawai negeri sipil mulai dari tingkat atas hingga tingkatan terendah. Anggotanya berkewajiban mengerahkan jiwa dan tenaga kerja perempuan di masing-masing tempatnya, dan yang menjadi anggotanya adalah anak perempuan berusia 15 tahun ke atas. Keanggotaan Fujinkai juga terbuka untuk orang asing (Panita Kongres Wanita Indonesia, 1986).

Pada tahun 1944-an, kekuatan angkatan bersenjata Jepang semakin ditantang oleh pihak Sekutu. Menyikapi situasi ini, selain lembaga yang sudah ada seperti *Keibondan* atau Pembantu Polisi, *Seinendan* atau yang dikenal Barisan Pemuda, serta *Heiho* yang merupakan Pembantu Prajurit, Pembela Tanah Air (PETA), pemerintah Jepang merasa perlu membentuk sebuah pasukan barisan Srikandi bagian dari Fujinkai. Pasukan Srikandi ini betul-betul dipersiapkan sebagai pasukan pertempuran, karena pasukan mereka sudah memiliki segala macam pengetahuan militer, sehingga pasukan ini sudah memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam bidang militer (Sondarika, 2017).

Pada penghujung masa pemerintahan dan pendudukan Jepang keadaan makin sulit dan makanan pun sulit didapat. Demikian pula Romusha menyebar ke daratan Asia dalam bentuk kerja paksa, dan akhirnya mereka menjadi kelompok manusia yang terbuang percuma karena tidak lagi mendapat perhatian, banyak dari mereka menghilang begitu saja. Bahkan tidak ada kekuatan untuk kembali ke kampung halaman. Untuk mengatasi situasi yang semakin tidak stabil, para perempuan dibawah payung Fujinkai turun ke jalan untuk menyampaikan informasi kepada ibu-ibu di wilayah *Tonarigumi* atau saat ini dikenal sebagai Rukun Tetangga dan bekerja keras untuk melakukan kampanye penghematan. Selain itu, beliau juga bergerak di bidang persawahan dan penanaman padi, penanaman kapas dan jarak (Lasmidjah, 1985).

Peran Fujinkai Dalam Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia

Pemerintah Jepang membentuk Fujinkai yaitu untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan pribumi untuk mengisi jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan. Banyak pemimpin nasionalis yang menjadi pejabat dan terikat dalam struktur pemerintahan Jepang. Pembentukan *Fujinkai* pada awalnya ditujukan sebagai salah satu organisasi militer yang menghimpun para wanita muda, di mana anggotanya terdiri dari para wanita yang berumur minimum 15 tahun dengan batas maksimum tidak ditentukan. Sedangkan dalam pembentukan organisasi ini juga ditunjukkan membantu peran para suami yang notebenanya para pejabat dan pegawai pemerintah yang tunduk kepada keinginan penguasa militer (Sondarika, 2017).



Gambar 2. Fujinkai sedang berbaris sambil mengangkat senjata

Sumber: Tirto.id, 2019

Pada dasarnya pemerintah Jepang hanya mengizinkan satu organisasi perempuan *Fujinkai* yang dapat bergerak dan berperan dalam masalah-masalah pendidikan dan kegiatan sosial lainnya untuk kepentingan itu pihak penguasa banyak melakukan pembinaan terhadap perkembangan organisasi tersebut. Dalam satu kesempatan kerjasama antara wanita Fujinkai dan para pemuda yang bergabung dalam Heiho pada sebuah acara kesenian Islam yang

dipertunjukkan kegiatan-kegiatan kaum muda Islam bagian keputrian dengan bentuk-bentuk kegiatan yang ditujukan pada wanita muda (Kosasih, 2019).



Gambar 3. Dokumentasi foto bersama Fujinkai Dai Nippon
Sumber: Postkata.com, 2018

Dukungan terhadap kegiatan *Fujinkai* langsung mendapat perhatian yang besar dari penguasa Jepang, seperti terlihat pada isi pidato yang disampaikan oleh Kolonel Nakayama tentang pendidikan, semangat baru pada anak-anak yang harus diperdalam dan dapat dilakukan oleh guru-guru yang telah mendapatkan pendidikan secukupnya. Sebagai langkah nyata dari isi pidato itu pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Keputrian Fujinkai mengadakan pembukaan Kursus Latihan Guru. Yang menjadi pesertanya adalah kaum putri yang telah mendapatkan pendidikan dasar sebelumnya dan bertujuan agar dapat memberi pengajaran kepada kaum putri lainnya yang belum mendapat pendidikan (Kosasih, 2019).

Macam-macam kursus yang diselenggarakan seperti: kursus pengetahuan umum, pemberantasan buta huruf, kursus pekerjaan atau keterampilan tangan (menjahit atau memasak) dan pendidikan lainnya diberikan kepada kaum wanita muda selaku barisan pendukung yang berada di belakang kekuatan tentara Jepang. Tak heran bila kemudian peran organisasi seperti Fujinkai sebagai satu-satunya organisasi pemerintah banyak mendapat pertentangan bahkan ditolak oleh kalangan wanita sendiri. Bagi kaum perempuan militan, mereka dihadapkan pada keputusan apakah akan ikut bekerjasama dengan organisasi yang serba dibatasi tersebut atau tidak (Lasmidjah, 1984). Dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Fujinkai pada hakekatnya tidak terlepas dari rencana yang tertuang dalam Jawa Hokokai yang meliputi pelaksanaan segenap bangsa dan penguatan bela tanah air secara benar dan ikhlas dilandasi semangat persaudaraan antar sesama.

Feminisme dan Isu Perjuangan Perempuan Indonesia

Feminisme ialah sebuah gerakan yang menuntut emansipasi atau kesetaraan dan keadilan hak dengan laki-laki. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan (Jaya, 2019). Feminisme merupakan kepercayaan yang berasal dari negara-negara Barat yang berhubungan dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara laki-

laki dan perempuan di seluruh dunia melalui organisasi yang mewakili hak-hak perempuan (Johan & Ahmad, 2017).



Gambar 4. Srikandi Indonesia, bukti kesetaraan gender di abad ke-21
Sumber: harianinhuaonline.com, 2021

Perjuangan hak-hak perempuan dan juga feminisme, sangat bergantung pada situasi dan kondisi zaman yang dihadapi. Seperti, Pasca kemerdekaan, perempuan mengambil bagian memperjuangkan kesetaraan untuk memperoleh akses dalam negara. Dalam kesibukan revolusi fisik maupun dalam bidang sosial politik, pergerakan wanita berbenah diri untuk menggalang persatuan yang kuat. Kongres pertama diadakan di Klaten pada bulan Desember 1945, dengan maksud menggalang persatuan dan membentuk badan persatuan. Isu-isu yang berkembang sebenarnya belum jauh dari masa sebelum merdeka. Emansipasi diberbagai bidang termasuk penolakan poligami, pembenahan pendidikan dan sebagainya. Untuk pertama kali, ditetapkan aturan yang memberi perlindungan bagi perempuan, yakni Undang-undang Keluarga Nomor 22 tahun 1946. Salah satu pasal menyebutkan bahwa perkawinan, perceraian dan rujuk harus dicatatkan (Jaya, 2019).

Pergerakan feminisme yang dilakukan oleh perempuan melalui organisasi perempuan, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) yang merupakan badan fusi Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani), Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Gerakan feminisme saat ini masih berjuang untuk akses pendidikan, menentang poligami, menolak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan, dan kebutuhan perempuan pada masa itu. Sedangkan, pada era Orde Baru, dimana masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kondisi kerja yang menciptakan buruh-buruh di bidang tekstil, pertanian hingga pekerja migran Indonesia yang didominasi oleh perempuan yang dikirim untuk bekerja ke luar negeri. Permasalahan pada tenaga kerja wanita, mulai timbul setelah era industrialisasi berkembang pesat di daerah perkotaan (Kiranantika, 2020).

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998-1999 juga turut menambah masalah baru dalam sektor industri, yang mengakibatkan melonjaknya angka pengangguran sebesar 36 juta jiwa pada saat itu. Dari kondisi tersebutlah gerakan-gerakan feminisme Indonesia mulai hadir

dan berkembang seperti pada tahun-tahun Poetri Mardika didirikan. Gerakan feminisme yang muncul pada saat itu, tidak hanya besuara mengenai hak-hak kaum perempuan atau tenaga kerja wanita, namun juga menyuarakan aspek-aspek sosial lainnya, seperti membela hak rakyat tak mampu dan anak-anak yang dimotori oleh Wardah Hafiz dan Ratna Sarumpaet (Djoeffan, 2001). Dari masa ke masa, perjuangan perempuan tak pernah luput dalam keikutsertaannya menyuarakan isu sosial ekonomi nasional, dan ini merupakan bukti bahwa perempuan tidak hanya mementingkan hak dari kaumnya saja, melainkan hak semua orang. Selain itu, setelah masa reformasi bergulir, gerakan perempuan Indonesia semakin menguat. Terbukanya kran demokrasi pada awal tahun 1999 menjadi pijakan yang menggembirakan bagi perempuan. Hal ini dapat ditelusuri dari peran negara yang beritikad untuk memperhatikan persoalan kesetaraan melalui ditetapkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (Suhada, 2021)

Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya. UUD 1945, UU Pemilu, UU Partai Politik, dan beberapa peraturan lainnya telah mengatur tentang akses perempuan di Indonesia dalam politik, pendidikan dan segenap aspek lainnya. Jaminan ruang keterwakilan perempuan dalam berpolitik dengan kuota 30% oleh perundangan, masuknya perempuan dalam eksekutif, kebutuhan perbaikan tingkat kesehatan reproduksi perempuan, hak-hak buruh perempuan, *equal* (setara) dalam memperoleh akses pendidikan, mulai nampak sebagai aksi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di Indonesia (Harida, 2015).

Kesimpulan

Posisi perempuan Indonesia pada saat Jepang menduduki dan menguasai Indonesia tidak mendapatkan banyak kesempatan karena setiap gerakan diawasi secara ketat oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang telah membentuk organisasi perempuan atau biasa disebut juga Fujinkai yang status khususnya menampung berbagai bentuk kegiatan perempuan. Anggotanya berkewajiban mengerahkan jiwa dan tenaga kerja perempuan di masing-masing tempatnya, dan yang menjadi anggotanya adalah anak perempuan berusia 15 tahun ke atas.

Semasa Perang Jepang, Fujinkai turun ke jalan untuk menyampaikan informasi kepada ibu-ibu di wilayah *Tonarigumi* atau saat ini dikenal sebagai Rukun Tetangga dan bekerja keras untuk melakukan kampanye penghematan. Dalam kegiatannya, Fujinkai mendapat kursus yang mendukung keterampilan perempuan Indonesia dalam banyak hal, terutama membantu Jepang dibalik layar. Hal ini berkaitan juga dengan isu feminisme dan gerakan perempuan yang mendukung emansipasi diberbagai bidang termasuk penolakan poligami, pembenahan pendidikan dan sebagainya di era modern seperti sekarang ini. Jaminan ruang keterwakilan perempuan dalam berpolitik dengan kuota 30% oleh perundangan, masuknya

perempuan dalam eksekutif, kebutuhan perbaikan tingkat kesehatan reproduksi perempuan, hak-hak buruh perempuan, *equal* (setara) dalam memperoleh akses pendidikan merupakan dinamika positif yang digaungkan oleh perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kepenulisan ini. Bapak Suparman, M.Pd. dan Bapak Yusuf Perdana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing serta terkhusus untuk Program Studi Pendidikan Sejarah tercipta yang telah bersedia membantu dan memfasilitasi penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Djoeffan, S. H. (2001). Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang. *Jurnal Mimbar*, 3(1): 284. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v1i1.3.49>.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Penerjemah: Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hamid, A. R. & Muhammad S. M. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Harida, E. S. (2015). Persepsi civitas akademika terhadap kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di IAIN Padangsidimpuan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*. 1(2): 55. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v1i2.361>.
- Jaya, Dadang. (2019). Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam Gender and Feminism: A Research from the Perspective of Islamic Studies. *Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS)*. 04(01): 26. Retrieved from <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/18>.
- Johan, A & Ahmad, M. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relenvesinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender. *Jurnal Marwah*. 16(2), 141-155. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4137>.
- Kiranantika, A. (Ed.). (2020). *Perempuan, Anak dan Keluarga Dalam Arus Perubahan*. Jakarta: Nas Media Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1983). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kosasih, A. (2019). Perjuangan Politik Perempuan di Masa Pendudukan Jepang. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(9), 5-6. Retrieved from <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/4222>.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lasmidjah, H. (1984). *Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Lestari, Puji. (2016). *Feminisme Sebagai Teori Dan Gerakan Sosial Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Manus, M. (1985). *Peranan Wanita Indonesia Di Masa Perang Kemerdekaan (1945-1950)*. Jakarta: Depdikbud.

- Mukmin, H. (1980). *Beberapa Aspek Perjuangan Kaum Wanita*. Jakarta. Binacipta.
- Panitia Kongres Wanita Indonesia. (1986). *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs. (2011). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta. UGM Press.
- Soediro, S. (1945). *Wanita Berdjoeanglah*. Pradjoerit Publisher.
- Sondarika, W. (2017). Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 5(2), 212-213. <https://doi.org/10.24127/hj.v5i2.958>
- Suhada, Djilzaran Nurul. (2021). Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)*. 3(1): 22. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.42>.
- Wasino, H. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Zainal, F., Swatika, K., & Sugiyanto, S. (2020). The Dynamics of Indonesia Lumajang Football Club in 1947-2018. *Jurnal Historica*, 4(1), 76-86. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/16375>.